

Judul : Ekspor sawit dibuka kembali
Tanggal : Jumat, 20 Mei 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 15

Ekspor Sawit Dibuka Kembali

Pasokan bahan baku dan harga minyak goreng dinilai makin terkendali sejak pelarangan ekspor pada 28 April 2022. Petani berharap harga tandan segera naik lagi.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memutuskan membuka kembali ekspor minyak goreng mulai Senin (23/5/2022). Selain 17 juta tenaga kerja di industri sawit, situasi pasokan dan harga minyak goreng menjadi pertimbangan atas keputusan tersebut. Pemerintah menyatakan akan tetap memantau untuk memastikan pasokan minyak goreng tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.

Presiden Joko Widodo, saat menyampaikan keputusan itu di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/5), menyatakan, sejak pelarangan ekspor diterapkan, pemerintah mendorong berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng. "Berdasarkan pengecekan langsung saya di lapangan dan juga laporan yang saya terima, alhamdulillah, pasokan minyak goreng terus bertambah," ujarnya.

Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah lebih kurang 194.000 ton per bulan. Pada Maret 2022, sebelum ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dilarang mulai 28 April 2022, pasokan hanya 64.500 ton. Namun, setelah pelarangan, pasokan mencapai 211.000 ton per bulan atau melebihi kebutuhan nasional bulanan.

Selain itu, harga rata-rata minyak goreng secara nasi-

onal turun. Pada April 2022, harga rata-rata minyak goreng curah nasional lebih kurang Rp 19.800 per liter. Namun, setelah ada pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp 17.200-Rp 17.600 per liter.

"Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama, baik dari pemerintah, dari BUMN, maupun swasta. Walaupun memang ada beberapa daerah yang, saya tahu, harga minyak gorengnya masih relatif tinggi. Namun, saya meyakini, dalam beberapa minggu ke depan, harga minyak goreng curah semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya semakin melimpah," katanya.

Secara kelembagaan, pemerintah akan membenahi prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pembenahan dilakukan agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan serta harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.

Apresiasi petani

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Gulat Manurung mengapresiasi langkah pemerintah yang

membuka kembali ekspor produk sawit, termasuk minyak goreng dan minyak sawit mentah (CPO).

Menurut dia, sejak pemerintah melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, harga tandan buah segar di tingkat petani anjlok hingga 70 persen. "Larangan ekspor kemarin harus jadi pelajaran bagi pemangku sawit nasional untuk 'naik kelas', baik dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto berharap keputusan itu tetap diiringi upaya perbaikan tata kelola sawit nasional. "Roda ekonomi petani sawit diharapkan kembali baik, sejalan dengan perbaikan tata kelola BPDPKS," ujarnya.

Apresiasi serupa disampaikan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih. Menurut dia, perombakan tata kelola persawitan mendesak direalisasikan secara konsisten, antara lain dengan mendorong peran petani sawit rakyat lebih besar di industri sawit nasional.

Ekonom Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, menilai, pemerintah perlu lebih jeli mencari penyebab tingginya harga minyak goreng.

(CAS/DIM/MKN)